

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia dan menjadi topik pembahasan yang selalu dibicarakan di berbagai kalangan, baik masyarakat umum, akademisi, maupun pemerintah [1][2]. Kemiskinan memiliki sifat yang kompleks dan multidimensi, berkaitan tidak hanya dengan aspek ekonomi, tetapi juga meliputi aspek sosial, budaya, dan pendidikan yang saling berhubungan [3]. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan diartikan sebagai kesulitan finansial untuk memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun non makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran [3][4]. Namun, faktor ekonomi belum tentu mampu menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), kemiskinan dinilai dari berbagai dimensi melalui *Multidimensional Poverty Indeks* (MPI) seperti pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup [5]. Sehingga, hal ini menegaskan bahwa kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga oleh kurangnya akses terhadap layanan dasar dan kualitas hidup yang layak.

Di Indonesia, upaya penanganan kemiskinan telah menjadi bagian dari amanat konstitusional, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia [3]. Sejak masa kemerdekaan, pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan dan program untuk mengurangi kemiskinan melalui beberapa bantuan sosial atau bansos, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan lain lain untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat [6]. Tetapi, meskipun berbagai program telah dilaksanakan, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal ketepatan sasaran penerima bantuan.

Permasalahan utama dalam distribusi bantuan sosial (bansos) disebabkan oleh faktor internal dan eksternal [6]. Faktor internal meliputi kesalahan inklusi dan eksklusi dalam penentuan sasaran, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung. Sedangkan faktor eksternal mencakup kurangnya dukungan dari pemerintah daerah serta kendala geografis yang menyulitkan proses pendampingan dan pemantauan [7]. Dalam rangka meningkatkan efektivitas program, pemerintah menciptakan sistem berupa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data nasional yang mencakup berbagai informasi indikator kesejahteraan individu serta rumah tangga miskin dan rentan [7][8]. DTKS disusun melalui proses pendataan awal, verifikasi, dan validasi di lapangan, musyawarah desa/kelurahan, hingga penetapan status rumah tangga [9][10]. DTKS memiliki keunggulan sebagai basis data nasional, dapat diperbarui secara berkala melalui pengumpulan data rutin, melibatkan partisipasi masyarakat, dan menggunakan indikator multidimensi untuk memahami kondisi kerentanan secara menyeluruh.

Meskipun menjadi rujukan utama bagi program bantuan sosial, sistem ini belum sepenuhnya optimal. Kekurangannya meliputi data yang tidak selalu mutakhir, potensi salah sasaran akibat kesalahan inklusi dan eksklusi, ketidakpaduan antar instansi, serta kurangnya transparansi dalam sistem pembobotan indikator [9]. Beberapa temuan menunjukkan bahwa verifikasi dan validasi DTKS melalui musyawarah desa/kelurahan tidak selalu berjalan secara seragam dan sesuai prosedur [9]. Terjadinya proses pemutakhiran data tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat desa/kelurahan, sehingga potensi ketidakadilan muncul [11]. Selain itu, pelaksanaan musyawarah desa kadang dipengaruhi oleh tingkat kooperatif aparat desa, interpretasi lokal terhadap kriteria, dan komunikasi antar pihak terkait [9][12]. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran daerah juga memengaruhi seberapa teliti verifikasi dilakukan, sehingga sering terjadi verifikasi yang tidak menyeluruh [13].

Beberapa laporan menunjukkan lebih dari 1,9 juta penerima bansos yang tidak layak menerima bantuan dan telah dicoret pada triwulan II tahun 2025 [14]. Pernyataan Kementerian Sosial yang dikutip oleh Antara News menyampaikan

temuan 12 juta data penerima bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran [15]. Diikuti dengan hasil pemantauan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2025 menunjukkan terdapat lebih dari 10 juta rekening penerima bansos yang terindikasi salah sasaran dengan nilai mencapai Rp2 triliun [16]. Temuan lain juga mendapatkan nilai bantuan sosial yang salah sasaran diperkirakan mencapai Rp14 hingga 17 triliun, dengan proporsi sekitar 45% dari penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako [17][18]. Hal ini sejalan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ombudsman RI yang menilai adanya praktik mal administrasi dalam distribusi bansos akibat lemahnya verifikasi dan akurasi data penerima [9][17]. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan pendekatan pengambilan keputusan yang lebih efektif, efisien, dan ilmiah dalam mengidentifikasi serta menentukan prioritas penanganan kemiskinan [8].

Di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, kemiskinan masih menjadi tantangan dalam pembangunan sosial ekonomi daerah yang memerlukan penanganan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo menunjukkan tren menurun meskipun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 tercatat sebesar 10,26%, menurun menjadi 9,32% pada tahun 2022, meningkat kembali menjadi 9,53% pada tahun 2023, dan kembali turun menjadi 9,11% pada tahun 2024. Meskipun tren kemiskinan menunjukkan penurunan hingga 9,11% pada tahun 2024 [3], persentase tersebut masih mencerminkan adanya kelompok keluarga yang rentan secara ekonomi dan belum sepenuhnya terjangkau oleh program sosial. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo, diperoleh informasi bahwa dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan dalam sistem penentuan prioritas penerima bantuan sosial. Sekitar 40% proses penyaluran bantuan sosial masih menghadapi kendala dalam aspek ketepatan sasaran, baik karena keterbatasan pembaruan data, kondisi ekonomi masyarakat, maupun belum adanya sistem pemeringkatan berbasis tingkat kerentanan yang terstruktur.

Berdasarkan ketentuan kebijakan yang berlaku, tidak ditemukan batas toleransi maksimal yang secara spesifik mengatur tingkat kesalahan inklusi maupun eksklusi dalam program penanggulangan kemiskinan. Namun demikian, dalam

perspektif kebijakan publik, tingginya tingkat kesalahan penargetan dapat mengurangi efektivitas dan keadilan distribusi bantuan sosial, sehingga kondisi tersebut menunjukkan perlunya pengembangan sistem penentuan prioritas yang lebih objektif dan terstruktur. Belum adanya sistem prioritas berbasis tingkat kerentanan menyebabkan program bantuan sering kali diberikan secara seragam, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi dan kebutuhan antar rumah tangga. Pemberian bantuan yang seragam berpotensi menimbulkan bias, ketidakadilan, tumpah tindih bantuan, serta mengurangi efektivitas dan efisiensi anggaran secara keseluruhan.

Kondisi lapangan di Kabupaten Ponorogo menunjukkan tantangan nyata terkait akses dasar dan kualitas hidup masyarakat. Hingga tahun 2024, masih ada 1854 rumah tangga tidak mampu yang baru tersambung listrik melalui program sambung listrik gratis [19]. Di sejumlah wilayah pelosok, ratusan warga menempuh perjalanan melewati hutan demi mendapatkan air bersih, sehingga Pemerintah Kabupaten bersama Palang Merah Indonesia mendistribusikan 53 ribu liter air bersih ke tiga kecamatan terdampak kekeringan [20]. Di sisi kesehatan, kasus *stunting* turun hingga 9,33% pada tahun 2021-2023 dan target *Universal Health Coverage* (UHC) ditetapkan 90% pada tahun 2025 [21]. Upaya tersebut sejalan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 yang memiliki visi untuk mewujudkan Kabupaten Ponorogo yang HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah, dan Takwa) [22]. Dengan salah satu misinya adalah “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pembangunan Budaya”, yang menekankan pengurangan angka kemiskinan melalui peningkatan kualitas hidup dan akses layanan dasar bagi masyarakat [22].

Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi kemiskinan, seperti bantuan sosial, penyusunan regulasi lokal, dan penyesuaian program desa dengan prioritas pembangunan daerah dan pusat [14]. Namun, keterbatasan sumber daya yang ada memerlukan adanya mekanisme penentuan prioritas penanganan yang lebih sistematis dan objektif agar program

dapat dilaksanakan dengan tepat dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Tanpa adanya prioritas yang tepat, efektivitas program akan menurun dan tidak maksimal, yang dapat menyebabkan hasil yang kurang memuaskan dalam menangani kemiskinan. Sehingga, diperlukan proses pengambilan keputusan yang mampu mengakomodasi beragam kriteria, seperti indikator sosial, ekonomi, dan beberapa faktor lain yang saling berkaitan, serta ketidakpastian dalam data, agar prioritas penanganan kemiskinan di Kabupaten Ponorogo dapat ditentukan dengan optimal.

Sejalan dengan kebutuhan tersebut, penentuan prioritas penanganan kemiskinan memerlukan indikator kesejahteraan yang mampu merepresentasikan kondisi sosial ekonomi rumah tangga secara menyeluruh. Sehingga kesejahteraan bersifat multidimensi dan tidak hanya ditentukan oleh satu faktor tunggal, melainkan berbagai aspek yang saling berkaitan. Dalam praktik pendataan sosial di Indonesia, indikator kesejahteraan rumah tangga telah dirumuskan dalam instrumen verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta publikasi indikator kesejahteraan rumah tangga oleh BPS [24][25]. Variabel-variabel tersebut menjadi dasar dalam proses identifikasi dan penetapan sasaran bantuan sosial, yang mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat, kebutuhan kebijakan, dan ketersediaan data lapangan. Selain itu, variabel tersebut juga digunakan dalam penyusunan Indeks Kesejahteraan Keluarga (IKK) [25][26].

Berdasarkan struktur variabel yang tersedia dalam formulir pendataan dan verifikasi lapangan DTKS pada lokasi penelitian, studi ini menggunakan 14 indikator kondisi sosial ekonomi sebagai variabel penilaian. Keempat belas indikator tersebut merupakan turunan langsung dari variabel yang tercantum dalam instrumen pendataan lapangan, dan dipilih sesuai dengan data yang tersedia [25][26]. Indikator yang digunakan meliputi aspek pendidikan yaitu tingkat pendidikan kepala rumah tangga, kesehatan berupa kepemilikan jaminan kesehatan, kondisi hunian meliputi jenis lantai, jenis dinding, luas lantai per kapita, akses utilitas seperti sumber air minum, fasilitas sanitasi, dan sumber penerangan, kepemilikan aset tabungan, serta kondisi ekonomi rumah tangga meliputi pekerjaan dan pendapatan kepala rumah tangga. Indikator-indikator tersebut hasil adaptasi

dari variabel kesejahteraan yang digunakan dalam praktik pendataan sosial. Dengan demikian, penggunaan 14 indikator dalam penelitian ini merepresentasikan spesifikasi variabel yang tersedia dalam sistem pendataan DTKS dan kerangka IKK, tanpa membatasi kemungkinan penambahan indikator lain.

Kompleksitas ini memerlukan penerapan metode yang dapat mengakomodasi berbagai kriteria sekaligus dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu metode yang sesuai untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah *Multi Criteria Decision Making* (MCDM), yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan dalam menghadapi keadaan yang melibatkan banyak kriteria yang sering kali saling bertentangan [15][16]. MCDM dirancang untuk menciptakan struktur pengambilan keputusan yang sistematis, mencakup penyusunan masalah, identifikasi kriteria, evaluasi alternatif, serta pembobotan kriteria, sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi lebih objektif, rasional, dan transparan [17]. Berbagai aplikasi (MCDM) telah berhasil diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pemilihan pegawai pemerintah, lingkungan, hingga pemilihan material konstruksi [18][19][20].

Keberhasilan penerapan tersebut menunjukkan bahwa MCDM efektif dan fleksibel untuk membantu proses pengambilan keputusan yang kompleks dan multidimensi. Tetapi, salah satu tantangan dalam penerapan metode MCDM ketika data dalam proses pengambilan keputusan bersifat tidak pasti, ambigu, atau kualitatif, sehingga sulit untuk memberikan nilai yang pasti dan objektif. Untuk mengatasi permasalahan ini, konsep *fuzzy logic* digunakan sebagai pendekatan yang mampu menangani ketidakpastian dan ambiguitas dalam pengambilan keputusan [21]. *Fuzzy logic* memungkinkan representasi nilai tidak pasti dengan menggunakan himpunan *fuzzy*, di mana suatu elemen dapat memiliki derajat keanggotaan antara 0 dan 1. Pendekatan ini berguna dalam konteks pengambilan keputusan yang melibatkan penilaian subjektif, seperti menilai tingkat kemiskinan berdasarkan indikator sosial ekonomi yang tidak selalu dapat diukur secara kuantitatif [21][22].

Dalam MCDM, penerapan *fuzzy logic* menghasilkan metode *fuzzy MCDM* yang mengintegrasikan analisis multikriteria dengan kemampuan *fuzzy* untuk

mengatasi ketidakpastian [23]. Salah satunya yaitu metode *fuzzy Analytical Hierarchy Process* (*fuzzy AHP*) yang mengadaptasi teknik pembobotan dan perbandingan berpasangan dari AHP klasik dengan memanfaatkan bilangan *fuzzy*, sehingga hasil penilaian menjadi lebih realistis dan mencerminkan ketidakpastian dalam penilaian manusia [20][22]. Penerapan *fuzzy logic* dalam menentukan prioritas penanganan kemiskinan sangat relevan, mengingat kompleksitas dan ketidakpastian data sosial ekonomi yang tersedia. Dengan demikian, *fuzzy AHP* mampu mengurangi subjektivitas dan meningkatkan konsistensi dalam penilaian kriteria yang kompleks, seperti indikator kemiskinan yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sehingga, pemerintah daerah dapat memperoleh hasil evaluasi yang lebih tepat dan dapat diandalkan, sehingga program penanggulangan kemiskinan dapat direncanakan dan diimplementasikan dengan lebih tepat sasaran dan efisien.

Setelah bobot kriteria ditentukan melalui *fuzzy AHP*, tahap berikutnya adalah menilai dan mengurutkan alternatif rumah tangga dalam penanganan kemiskinan. Salah satu metode yang mampu untuk melakukan evaluasi ini adalah *fuzzy Weighted Aggregated Sum Product Assessment* (*fuzzy WASPAS*) [24]. Metode WASPAS merupakan gabungan dari dua teknik *Multi Criteria Decision Making* (MCDM), yaitu *Weighted Sum Model* (WSM) dan *Weighted Product Model* (WPM), yang digabungkan untuk menghasilkan hasil evaluasi yang lebih stabil dan akurat [20][22]. Penerapan kombinasi *fuzzy AHP* dan *fuzzy WASPAS* dalam penentuan prioritas penanganan kemiskinan di Kabupaten Ponorogo dapat memberikan manfaat signifikan. *Fuzzy AHP* membantu dalam menentukan bobot kriteria yang mencerminkan kompleksitas dan ketidakpastian indikator kemiskinan secara lebih realistis. Sedangkan *fuzzy WASPAS* berperan dalam melakukan perangkingan prioritas rumah tangga dengan menggunakan perhitungan berdasarkan bobot indikator kemiskinan yang didapatkan.

Berbagai penelitian terdahulu telah menunjukkan efektivitas dan fleksibilitas metode *hybrid fuzzy AHP* dan *fuzzy WASPAS* dalam berbagai bidang. Penelitian oleh [32] dalam studi “*Evaluating Environmental, Social, and Governance Criteria and Green Finance Investment Strategies Using Fuzzy AHP*

and Fuzzy WASPAS” menunjukkan bahwa metode ini efektif dalam mengevaluasi strategi investasi hijau berbasis kriteria *environmental, social, and governance* (ESG). Pada bidang pendidikan oleh [37] menggunakan metode ini dalam penelitian “*Integrated Selection of Permanent Teacher Appointments Recommended MCDM-AHP and WASPAS Methods*” untuk seleksi guru tetap. Sementara itu, dalam [38] mengaplikasikan metode ini dalam “*Intuitionistic Fuzzy AHP and WASPAS to Assess Service Quality in Online Transportation*” untuk evaluasi kualitas layanan transportasi daring. Selain itu, penelitian [39] dalam artikel berjudul “*Alpha-cut Representation Used for Defuzzification in Rule Based Systems*” menjelaskan bahwa pendekatan *alpha-cut* digunakan untuk merepresentasikan dan mengelola ketidakpastian pada sistem berbasis *fuzzy* melalui pembatasan tingkat keanggotaan tertentu (α -level). Pendekatan ini memungkinkan proses defuzzifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan derajat ketidakpastian secara lebih terstruktur, sehingga menghasilkan nilai representatif yang lebih stabil dan rasional. Beragam penerapan ini membuktikan bahwa metode *fuzzy Analytical Hierarchy Process* (*fuzzy AHP*) dan *Weighted Aggregated Sum Product Assessment* (*WASPAS*) adaptif dan mampu membantu pengambilan keputusan multidimensi di berbagai konteks. Dengan demikian, penerapan metode ini dapat memberikan solusi dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai kriteria dan ketidakpastian.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pendekatan pengambilan keputusan dalam penentuan prioritas penanganan kemiskinan di Kabupaten Ponorogo, menggunakan kombinasi metode *fuzzy AHP* dan *fuzzy WASPAS*. Meskipun kedua metode ini telah banyak diterapkan di berbagai bidang, seperti konstruksi, investasi hijau, pendidikan, dan layanan publik, penerapan keduanya dalam konteks penanganan kemiskinan masih terbatas. Permasalahan utama yang dihadapi saat ini terletak pada ketidakakuratan dalam penentuan prioritas penerima bantuan [9][16], kurangnya transparansi [11], dan objektivitas dalam pembobotan indikator kemiskinan keluarga [12]. Selain itu, proses musyawarah desa/kelurahan yang menjadi dasar verifikasi data yang menimbulkan subjektivitas. Penelitian ini

mengisi gap tersebut dengan pendekatan ilmiah multikriteria sebagai alternatif pelengkap DTKS, bukan pengganti. Pembobotan kriteria dilakukan secara transparan menggunakan *fuzzy Analytical Hierarchy Process (fuzzy AHP)* berdasarkan penilaian ahli melalui keterlibatan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, lembaga sosial, dan masyarakat, yang sangat penting untuk memastikan bahwa kriteria dan alternatif yang dipilih benar-benar relevan dan dapat diterapkan. Selain itu, *fuzzy Weighted Aggregated Sum Product Assessment (fuzzy WASPAS)* digunakan untuk mengevaluasi dan memeringkat prioritas rumah tangga miskin. Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kebijakan penanganan kemiskinan.

Tahapan penelitian meliputi pembobotan kriteria menggunakan *fuzzy AHP*, perangkingan menggunakan *fuzzy WASPAS*, serta segmentasi prioritas berbasis desil (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) DTKS (Desil 1–4) yang merepresentasikan 40% rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah sebagai dasar klasifikasi tingkat kemiskinan [40][41]. Kemudian evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil sistem terhadap data lapangan melalui survei pakar dan masyarakat. Hasil akhir disajikan dalam *dashboard* interaktif yang dilengkapi fitur visualisasi, inputasi data, pemetaan menggunakan *Geographic Information System (GIS)*, serta interpretasi terhadap setiap klaster prioritas. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis untuk pemerintah daerah dalam merancang kebijakan penentuan prioritas kemiskinan yang lebih adil dan tepat sasaran. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengisi kekurangan literatur yang berkaitan dengan penerapan metode *fuzzy* dalam konteks sosial ekonomi di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan solusi teknis dalam pengambilan keputusan, tetapi juga memperkuat aplikasi metode *Multi Criteria Decision Making (MCDM) fuzzy* dalam penanganan kemiskinan yang adil dan transparan.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan dirumuskan sebagai berikut,

1. Bagaimana menentukan bobot prioritas indikator kemiskinan menggunakan *fuzzy Analytical Hierarchy Process (fuzzy AHP)* yang mampu menangkap ketidakpastian penilaian ahli?
2. Bagaimana mengintegrasikan hasil pembobotan *fuzzy Analytical Hierarchy Process (fuzzy AHP)* ke dalam metode *fuzzy Weighted Aggregated Sum Product Assessment (fuzzy WASPAS)* untuk memperoleh peringkat prioritas rumah tangga miskin?
3. Bagaimana model *fuzzy Analytical Hierarchy Process (fuzzy AHP)* dan *fuzzy Weighted Aggregated Sum Product Assessment (fuzzy WASPAS)* dapat memberikan rekomendasi prioritas kebijakan sosial yang tepat sasaran dalam konteks penanganan kemiskinan di Kabupaten Ponorogo?

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian terarah dan fokus, maka ditetapkan beberapa batasan sebagai berikut,

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada data keluarga yang berada di wilayah Kabupaten Ponorogo.
2. Indikator kemiskinan yang digunakan dibatasi pada indikator yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
3. Penentuan bobot indikator kemiskinan berdasarkan pendapat ahli atau keputusan pembuat kebijakan.
4. Penelitian hanya membahas aspek metodologis dan rekomendasi prioritas kebijakan, tidak sampai pada implementasi langsung program pemerintah.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah,

1. Menentukan bobot indikator kemiskinan menggunakan metode *fuzzy Analytical Hierarchy Process (fuzzy AHP)* untuk mengatasi subjektivitas penilaian ahli.
2. Mengintegrasikan hasil pembobotan *fuzzy Analytical Hierarchy Process (fuzzy AHP)* ke dalam *fuzzy Weighted Aggregated Sum Product Assessment (fuzzy*

WASPAS) untuk memperoleh peringkat prioritas penanganan rumah tangga miskin.

3. Menghasilkan model pengambilan keputusan berbasis *fuzzy Analytical Hierarchy Process* (*fuzzy AHP*) dan *fuzzy Weighted Aggregated Sum Product Assessment* (*fuzzy WASPAS*) dan memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata baik dari perspektif teoritis maupun praktis. Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini antara lain,

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan metode *Multi Criteria Decision Making* (MCDM) berbasis *fuzzy* dengan mengintegrasikan *fuzzy Analytical Hierarchy Process* (*fuzzy AHP*) untuk pembobotan kriteria dan *fuzzy Weighted Aggregated Sum Product Assessment* (*fuzzy WASPAS*) untuk proses perangkingan alternatif.
 - b. Menambah literatur ilmiah mengenai penerapan *fuzzy* dalam sistem pengambilan keputusan pada tingkat kebijakan publik daerah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan rekomendasi prioritas program penanganan kemiskinan di Kabupaten Ponorogo berdasarkan analisis kuantitatif yang lebih objektif, sistematis, dan mempertimbangkan ketidakpastian data.
 - b. Menjadi alat bantu bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi intervensi sosial yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
 - c. Membantu proses pengambilan keputusan lintas sektor (pemerintah, akademisi, dan masyarakat) melalui pendekatan berbasis data dan metodologi ilmiah.

- d. Dapat diimplementasikan sebagai model *Decision Support System* (DSS) yang fleksibel dan dapat disesuaikan untuk wilayah lain dengan permasalahan kemiskinan serupa